

PENGARUH JUMLAH PENGANGGURAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Hendri Andika Saputra^{1*}, Irsad Lubis^{2*}

¹⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara
Email : hendri.as49@gmail.com

²⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara
Email : irsad@usu.ac.id

ABSTRACT

This text discusses a research study conducted in Bahasa Indonesia. It seems to be focused on examining the influence of unemployment and the number of poor people on the Human Development Index in the city of Bukittinggi. The data used in the study is secondary data obtained from the Central Statistics Agency of Bukittinggi. The data analysis technique employed is multiple regression analysis using the Eviews 12 program. The results of the analysis indicate that the variable of unemployment has a positive and significant effect on the Human Development Index in Bukittinggi, as evidenced by the t-value of 3.068 with a significance level (Sig.) smaller than the significance level ($0.0107 < 0.05$). On the other hand, the variable of the number of poor people shows a negative and significant impact on the Human Development Index in Bukittinggi, with a t-value of -3.788 and a significance level (Sig.) smaller than the significance level ($0.003 < 0.05$). In summary, the study suggests that unemployment has a positive and significant influence, while the number of poor people has a negative and significant influence on the Human Development Index in Bukittinggi.

Keywords : *Unemployment Rate, Number of Poor People, and Human Development Index*

1. PENDAHULUAN

Istilah kemiskinan timbul ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimum dari suatu standar hidup tertentu. Secara sederhana, kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjaga keberlangsungan hidup. (1) Menurut World Bank (2004), salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima.

(2) Kemiskinan juga terkait dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, di mana mereka yang dianggap miskin umumnya mengalami pengangguran. Selain itu, tingkat pendidikan dan kesehatan mereka cenderung tidak memadai. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pendekatannya harus bersifat lintas sektor, melibatkan koordinasi dan integrasi yang baik antara masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan aspek lain yang erat kaitannya dengan kemiskinan.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju perbaikan, dengan tujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, kompetitif, maju, dan sejahtera dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa agar setiap tahap mendekati tujuan yang ditetapkan. Pentingnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan setiap daerah, dengan merujuk pada tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang dan jangka pendek.

Indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi faktor kunci dalam memilih strategi atau alat pembangunan yang tepat. (3) Artinya, pemilihan sektor fokus atau sektor unggulan dalam pembangunan nasional harus didasarkan pada efektivitasnya dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.

Baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi memperlihatkan pengaruh yang positif. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang mengalami pola yang menurun. Tabel 1.1 menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan sebesar 5,48 persen dan turun menjadi 5,35 persen pada tahun 2017, sampai tahun 2022 terjadi kenaikan dan penurunan persentase penduduk miskin.

Tabel 1. Persentase Kemiskinan di Kota Bukittinggi

Tahun	Persentase
2016	5,48
2017	5,35
2018	4,92
2019	4,60
2020	4,54
2021	5,14
2022	4,46

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka

Untuk itu, perlu diidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota sebagai panduan dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi penyebab kemiskinan, yang dapat dilihat melalui enam indeks kualitas hidup/ indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkontribusi pada rendahnya produktivitas kerja penduduk, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat pendapatan dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Pembangunan manusia di Indonesia terkait erat dengan pengurangan kemiskinan, terutama melalui investasi di pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dapat meningkatkan produktivitas penduduk miskin, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Pertumbuhan ekonomi menjadi kunci penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi mencerminkan kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. PDRB menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, di mana semakin tinggi PDRB suatu daerah, semakin besar potensi penerimaan daerah tersebut.

Faktor lain yang memengaruhi tingkat kemiskinan adalah pengangguran, yang berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat. Pengangguran dapat menurunkan tingkat kemakmuran yang

telah dicapai dan menjadi cermin kurangnya keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang lambat dapat memperparah masalah pengangguran dan kemiskinan di suatu daerah.

Indeks Pembangunan Manusia

(4) Konsep pembangunan manusia fokus pada pengembangan sumber daya manusia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan fisik dan mental bertujuan meningkatkan kapasitas dasar penduduk untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia, dengan dimensi meliputi: (5)

1. Longevity, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life expectancy of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk.
2. Educational Achievement, diukur dengan dua indikator, yaitu melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (adult literacy rate) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (the mean years of schooling).
3. Access to resource, dapat diukur secara makro melalui PDB riil per kapita dengan terminologi purchasing power parity dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS Indonesia, 2016), (6) Penghitungan metodologi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak tahun 2011 telah mengalami perubahan. Terdapat beberapa indikator yang berubah diantaranya yaitu:

1. Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Beberapa alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya yaitu:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM yaitu indikator angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf disebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik dan indikator PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

2. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Beberapa keunggulan penghitungan besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru yaitu: (7)

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) yaitu:
 - a. Memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
 - b. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

2. Menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, maka ketiga dimensi ini harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Menurut Badan

Pusat Statistik Indonesia (2016), indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

(8) Dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} \text{ dari } X_1 + X_2 + X_3$$

Dimana:

X1 = Indeks kesehatan

X2 = Indeks pendidikan

X3 = Indeks daya beli masyarakat

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Saputra (2011), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0-100 dengan kategori sebagai berikut:(9)

- a. IPM lebih dari 80,0 : Tinggi
- b. PM antara 66,0-79,9 : Menengah atas
- c. IPM antara 50,0-65,9 : Menengah bawah
- d. IPM kurang dari 50,0 : Rendah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan yang erat dengan jumlah penduduk miskin suatu wilayah. IPM tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek kesehatan dan pendidikan, yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

(10) Pertama-tama, melalui dimensi kesehatan, IPM mengukur harapan hidup dan angka kematian bayi. Jika penduduk memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang baik, harapan hidup dapat menurun, dan angka kematian bayi dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah keluarga yang

terjerumus dalam kemiskinan karena kesehatan yang buruk. Kedua, melalui dimensi pendidikan, IPM memperhitungkan tingkat melek huruf dan tahun rata-rata bersekolah. Jika tingkat pendidikan rendah, peluang pekerjaan yang layak menjadi terbatas, menyebabkan ketidakmampuan keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Selain itu, pembangunan manusia yang rendah, seperti yang diukur oleh IPM, dapat menjadi hambatan untuk menciptakan kesempatan ekonomi yang merata. Dengan kata lain, masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas mungkin lebih rentan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan IPM dapat menjadi indikator kemajuan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, karena mencerminkan upaya meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan secara keseluruhan.(11)

Kemiskinan

(12) Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara

(13) Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "capability deprivation" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan.

Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional

artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. (14)

Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse, 1953 dalam Mudrajat Kuncoro, (1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya. 20

2. Kemiskinan Relatif

(15) Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah

dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Pengangguran

(16) Para ahli banyak membahas masalah pengangguran yang tidak hanya menjadi permasalahan makroekonomi, tetapi juga mempengaruhi individu secara langsung, menjadi beban berat yang membawa dampak pada standar hidup dan kesejahteraan psikologis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengangguran sering menjadi perbincangan dalam debat politik, dengan para politisi mengklaim bahwa kebijakan yang mereka usulkan dapat membantu menciptakan lapangan kerja.

(17) Sukirno mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan ciri-cirinya menjadi empat kelompok. Pertama, pengangguran terbuka, yang merujuk pada tenaga kerja yang secara sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan dan berusaha maksimal untuk mendapatkannya, tetapi belum berhasil karena pertambahan lowongan pekerjaan lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Kedua, pengangguran tersembunyi, yang mencakup tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena berbagai alasan, termasuk kecilnya perusahaan dengan

tenaga kerja yang berlebihan. Ketiga, setengah menganggur, mengacu pada tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena kurangnya lapangan pekerjaan, biasanya bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Keempat, pengangguran bermusim, merujuk pada tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

(18) Pendidikan juga memainkan peran penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Todaro dan Smith menyatakan bahwa modal manusia dapat diinvestasikan melalui pendidikan dan kesehatan. Pendidikan memungkinkan perekonomian mengadopsi teknologi modern dan membangun kapasitas untuk pertumbuhan berkelanjutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi diri mereka. Pendidikan juga dianggap sebagai cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti yang diindikasikan oleh indikator rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin tinggi kualitasnya secara umum, baik dari segi pola pikir maupun tindakan

Terdapat hubungan yang erat antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah. Pengangguran, sebagai masalah makroekonomi yang signifikan, dapat menjadi penyebab langsung dari peningkatan tingkat kemiskinan. (19) Ketika banyak individu kehilangan pekerjaan, hal ini sering kali mengakibatkan penurunan standar hidup dan kesejahteraan ekonomi mereka.

(20) Pengangguran dapat secara langsung meningkatkan tingkat kemiskinan karena individu yang kehilangan pekerjaan mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pendapatan sepenuhnya. Tanpa sumber pendapatan yang stabil, mereka dapat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat

tinggal. Ini menyebabkan peningkatan risiko kemiskinan. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi dapat menciptakan tekanan ekonomi yang lebih luas dalam suatu wilayah. (21) Dampaknya mencakup penurunan daya beli masyarakat, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis dan sektor ekonomi lainnya. Ini dapat menciptakan lingkaran setan di mana penurunan kegiatan ekonomi menyebabkan lebih banyak kehilangan pekerjaan, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kemiskinan.

Tentu saja, strategi pengurangan pengangguran juga dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Kebijakan dan program yang mendukung penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan secara positif mempengaruhi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial, penting untuk memperhatikan hubungan kompleks antara pengangguran dan kemiskinan. Upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dapat menjadi langkah penting dalam mengatasi tantangan kemiskinan dalam suatu masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data adalah suatu informasi mengenai sesuatu yang di buktikan dalam penelitian. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tentang pengaruh jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan ekonomi. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber terkait yaitu BPS Kota Bukittinggi. Di samping itu data- data yang relevan juga di peroleh dari berbagai sumber bacaan dan juga internet.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh

atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Metode pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka.

Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

Model analisis yang digunakan adalah Analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program E-Views 12. Analisis linear regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,...Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e ;$$

Dimana:

Y = Indeks Pembangunan Manusia (Variabel Terikat)

β_0 = Konstanta β_1 dan β_2 = Koefisien Regresi

X1 = Jumlah pengangguran

X2 = Jumlah penduduk miskin

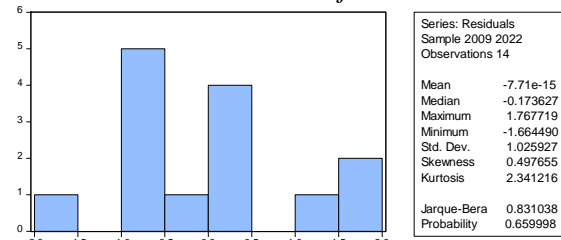
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Uji normalitas membandingkan antara data yang dimiliki dengan berdistribusi normal yang dimiliki mean dan standart devisi yang sama dengan data yang diteliti. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut sudah terdistribusikan secara normal. Berikut hasil uji normalitas yang di dapat :

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan

Berdasarkan output tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,0659 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Suatu model regresi dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas jika mempunyai nilai VIF < 10.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	Tolerance
X1	1.036971	< 10
X2	1.036971	< 10

Sumber : Data Olahan

Nilai VIF dan tolerance diatas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai VIF < 10

Uji Heterokedastisitas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan yakni menggunakan uji

dari gletser hasilnya adalah:

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-	1.141.8	Prob.	0.3543
statistic	7	F(2,11)	
Obs*R-	2.406.8	Prob. Chi-	0.3002
squared	8	Square(2)	
Scaled	1.830.8	Prob. Chi-	0.4004
explaine	2	Square(2)	
d SS			

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan output tersebut dapat dilihat bahwa pada kolom Sig yakni nilai Sig semua variabel > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)

Uji statistik t di dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh diantara variabel independent (Jumlah Pengangguran dan jumlah penduduk miskin) terhadap variabel dependen (Indeks pembangunan manusia) secara parsial/sendiri. Untuk melakukan uji T diperlukan perbandingan nilai Ttabel dengan Thitung dan dapat melihat nilai signifikannya (kurang dari 0,05). Pada penelitian ini diperoleh nilai ttabel sebesar 2,20099

Tabel 4. Hasil Uji Signifikan T

Variable	t – hitung	t - tabel	Prob.	Signf
C	2.165.984	2,20099	0.0000	0,05
Pengangguran	3.068.547	2,20099	0,0743	0,05
Penddk	-	2,20099	0.0030	0,05
Miskin	3.788.820			

Sumber : Data Olahan

Pada variabel jumlah pengangguran diperoleh nilai thitung sebesar 3,068. Nilai positif (+) pada thitung menjelaskan bahwa jumlah pengangguran berkorelasi positif terhadap IPM Sedangkan nilai thitung > ttabel (3,068 > 2,20099) dengan nilai Sig. yang lebih kecil dari taraf signifikansi (0,0107 < 0,05), yang berarti

jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bukittinggi.

Pada variabel jumlah penduduk miskin diperoleh nilai thitung sebesar - 3,788. Nilai negatif (-) pada thitung menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin berkorelasi negatif terhadap IPM Sedangkan nilai thitung > ttabel (3,788 > 2,20099) dengan nilai Sig. yang lebih kecil dari taraf signifikansi (0,003 < 0,05), yang berarti jumlah pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bukittinggi.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F merupakan pengujian secara bersama-sama (simultan) untuk memberikan pembuktian ada maupun tidaknya pengaruh antara seluruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dimasukkan dalam model. Untuk melakukan uji F diperlukan perbandingan nilai Ftabel dengan Fhitung dan dapat melihat nilai signifikannya (kurang dari 0,05).

Tabel 5. Hasil Uji Signifikan F

F-hitung	F-tabel	Sig
14,60139	3,982	0.000802
R-squared		: 0,7263
Adjusted R-squared		: 0,6777

Sumber : Data Olahan

Pada penelitian ini didapatkan nilai Ftabel sebesar 3,982 dan Fhitung sebesar 14,60139. Dapat dinyatakan bahwa nilai fhitung (14,60139) > ftabel (3,982) dan nilai Sig. (0,0008 < 0,05), dalam artian secara perhitungan simultan terdapat pengaruh dari variabel jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan di Kota Bukittinggi.

Koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel bebas, yaitu variabel jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin terhadap variabel terikat,

yaitu indeks pembangunan manusia. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,7263 Ternyata angka harapan hidup dan harapan lama sekolah mampu menjelaskan tingkat kemiskinan sebesar 72,63 persen dan sisanya 27,37 persen variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

Tabel 6. Hasil Uji Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error
C	8.865.156	4.092.900
Jumlah Pengangguran	0.001152	0.000376
Jumlah Penduduk	-0.002077	0.000548

Sumber : Data Olahan

Dari tabel di atas didapatkan hasil regresi seperti dibawah ini:

$$IPM = 8,856 + 0,001 - 0,002 + e$$

Nilai konstanta pada regresi berganda diatas adalah sebesar 8,856, apabila variabel independent diasumsikan bernilai nol (0), maka nilai variabel terikat (IPM) adalah sebesar 8,856. Interpretasi hasil regresi penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi jumlah pengangguran bernilai 0,001 artinya, jika jumlah pengangguran mengalami peningkatan sebesar satu juta jiwa, tingkat IPM akan menurun sebesar 0,001 persen dengan variabel independen lainnya diasumsikan konstan.
2. Koefisien regresi jumlah penduduk miskin bernilai -0,002 artinya, jika jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 1 persen, tingkat IPM juga akan menurun sebesar 0,002 persen dengan variabel independen lainnya diasumsikan konstan.

Pengaruh Jumlah Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bukittinggi

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran memiliki arah hubungan positif dengan indeks pembangunan manusia di Kota Bukittinggi. Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa, apabila pengangguran meningkat maka tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur juga akan naik, begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Meydiasari (2017) dan Baeti (2013) dimana pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM. Menurutnya jumlah pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemakmuran hidup masyarakat melalui berkurangnya pendapatan masyarakat yang menjadi faktor dominan dalam peningkatan pembangunan manusia. Hal ini berakibat masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperbaiki kualitas manusia seperti membayar biaya pendidikan dan kesehatan.

Salah satu solusi utama adalah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diambil: Pertama, pemerintah dapat mendorong investasi dalam sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja. Ini dapat mencakup sektor industri, pertanian, dan jasa. Dengan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi, dapat dihasilkan lebih banyak pekerjaan, sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Kedua, pelatihan keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dapat membantu mengurangi ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dan kebutuhan industri. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta.

Ketiga, mendukung kewirausahaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) dapat menjadi langkah penting. UKM seringkali menjadi motor pertumbuhan

ekonomi lokal dan dapat menciptakan peluang pekerjaan baru. Pemberian dukungan finansial, pelatihan, dan infrastruktur yang memadai dapat mendorong pertumbuhan sektor ini. Keempat, kebijakan perlindungan sosial dan jaminan pekerjaan dapat memberikan keamanan ekonomi bagi pekerja yang rentan. Ini mencakup asuransi pengangguran, program pelatihan yang didanai oleh pemerintah, dan langkah-langkah lainnya yang dapat membantu mengurangi dampak negatif pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Melalui kombinasi strategi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia suatu negara

Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bukittinggi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup manusia karena Ketika jumlah penduduk miskin menurun maka artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih termasuk memenuhi kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan sehingga kemampuan ini akan berdampak akan peningkatan indeks pembangunan manusia karena produktifitas juga meningkat. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kemiskinan pada suatu daerah dapat dikurangi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya melalui proses pembangunan manusianya. Sejalan dengan penelitian Ningrum dkk yang menyebutkan kemiskinan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap indeks pembangunan manusia.

Tingginya jumlah penduduk miskin dapat memberikan dampak negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah akses terhadap pendidikan. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan mungkin kesulitan memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka, yang

dapat mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi dalam pendidikan formal. Ini berpotensi menurunkan tingkat melek huruf dan kualifikasi pendidikan di populasi, yang merupakan komponen penting dalam perhitungan IPM. Kemiskinan juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak mendukung perkembangan manusia secara menyeluruh. Faktor psikososial, seperti stres dan ketidakpastian ekonomi, dapat memengaruhi kesejahteraan mental individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat berdampak pada produktivitas dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks ini, upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dapat meningkatkan IPM. Langkah-langkah seperti pemberian bantuan sosial, program pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi dapat membantu menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan manusia yang lebih baik, sehingga berkontribusi positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia suatu negara.

4. KESIMPULAN

Jumlah pengangguran berpengaruh positif yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dari hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa jika jumlah pengangguran mengalami peningkatan sebesar satu juta jiwa, tingkat IPM akan menurun sebesar 0,001 persen dengan variabel independen lainnya diasumsikan konstan. Jika jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 1 persen, tingkat IPM juga akan menurun sebesar 0,002 persen dengan variabel independen lainnya diasumsikan konstan.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin, diperlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pertama, pengurangan jumlah pengangguran dapat

diwujudkan melalui kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional dapat diperkuat untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja menghadapi tuntutan pasar. Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik.

Pemerintah dapat memperluas program perlindungan sosial, termasuk bantuan tunai, layanan kesehatan, dan pendidikan gratis. Inisiatif untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan akses lebih mudah ke kredit juga dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, upaya pemberdayaan perempuan dapat menjadi kunci untuk mengurangi kedua masalah ini. Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan partisipasi mereka dalam pasar kerja, sementara kebijakan yang mendukung kesetaraan gender akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Langkah-langkah ini perlu didukung oleh pengawasan yang ketat dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan efektivitasnya. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam mengurangi jumlah pengangguran dan penduduk miskin, sekaligus meningkatkan IPM secara keseluruhan.

5. REFERENSI

- [1] Jumlah Penduduk P, Kemiskinan D, Khristina Kiha E, Seran S, Trifonia Lau H. INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora 60 Emilia Khristina Kiha, Sirilius Seran & Hendriana Trifonia Lau.
- [2] Ristika ED, Primandhana WP, Wahed M. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. 2021 Nov 15;12(2):129.
- [3] Ningrum JW, Khairunnisa AH, Huda N. Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 2020 Jun 29;6(2):212.
- [4] Setiawan MB, Hakim A. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.
- [5] Sembiring EA. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara. 160 Accumulated Journal [Internet]. 2019;1(2). Available from: www.ksap.org
- [6] Harahap RU. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara [Internet]. Available from: www.djpkd.depkeu.go.id.
- [7] Marlina L. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business. 2022 Mar 23;6(1):87.
- [8] Sasana H, Ekonomika F, Bisnis D, Semarang U, Prof J, Tembalang S. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah).
- [9] Kemiskinan P, Ekonomi P, Belanja D, Sulistio D, Jurusan M*, Pembangunan E, et al. Economics Development Analysis Journal. EDAJ [Internet]. 2012;1(1). Available from: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>

- [10] Setiawan MB, Hakim A. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.
- [11] Fakultas A, Dan E, Islam B, Langsa I. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Vol. 2. 2018.
- [12] Kristin A, Uin P, Semarang W, Sulia U, Uin S, Abstrak WS. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah. 2018;6(2):217–40.
- [13] Dewi Pembimbing N, Yusuf dan Rita Yani Iyan Y. Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. Vol. 4, JOM Fekon.
- [14] Hadi A. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Terhadap Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Media Trend. 2019 Dec 27;14(2):148–53.
- [15] Kemiskinan P, Ekonomi P, Belanja D, Sulistio D, Jurusan M*, Pembangunan E, et al. Economics Development Analysis Journal. EDAJ [Internet]. 2012;1(1). Available from: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- [16] Pengaruh Tingkat Pertumbuhan EkonomiJeni Palindangan A, Bakar A, Palindangan J, Studi Ekonomi Pembangunan Jambatan Bulan P. Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Mimika. 2021;5.
- [17] Mahroji D, Ekonomi J, Stie P, Madania P. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. 2019;9(1). Available from: <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/>
- [18] Kemiskinan T, Kota K/, Provinsi D, Barat K, Yacoub Y. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap.
- [19] Yani Alfafa C, Bhakti A. Analisis ketimpangan pendapatan pedagang kaki lima di Kota Kuala Tungkal. Vol. 7. 2018.
- [20] Sirait N. E-Jurnal EP Unud, 2 [2] : 108-118 Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.
- [21] Fajar M. Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Formulasi Baru. Vol. 21. 2021.